

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

Konflik internal Partai Golongan Karya yang berada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terjadi karena syarat kepentingan pribadi, perbedaan kepentingan, ambisius pribadi, perbedaan pendapat, rasa tidak puas, keinginan kelompok kepentingan, gaya kepemimpinan yang tidak baik, pemanfaatan keadaan, prestasi yang hilang dan berkurang, sehingga hal tersebut dapat memicu untuk terjadinya konflik internal partai. Konflik yang terjadi di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung yang merupakan dampak yang nyata dari konflik internal yang terjadi di Dewan Pimpinan Pusat.

Selain merupakan implikasi dari konflik internal di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), konflik yang terjadi di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung juga dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu perbedaan kepentingan, ambisius pribadi, perbedaan pendapat, rasa kekecewaan, keinginan, gaya kepemimpinan yang tidak baik, pemanfaatan keadaan, yang berakibat terjadinya konflik internal partai Partai Golongan Karya di Provinsi Lampung.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori eksistensi partai politik yang dikemukakan oleh Randall dan Svansand dalam teori ini memiliki empat kriteria untuk mengetahui eksistensi partai politik yaitu:

1). Derajat Kesisteman;

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis mengenai derajat kesisteman, terkena dampak dari konflik internal yang terjadi karena dalam terjadinya konflik terjadinya pemecatan-pemecatan kepada kader yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan AD/ART tidak digunakan dalam hal pemecatan. Akibat dari terjadinya pemecatan terhadap kader. Hal tersebut memicu untuk timbulnya perpecahan.

2). Identitas Nilai;

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis mengenai identitas nilai, terkena dampak dari konflik internal yang terjadi karena dalam terjadinya konflik. Dalam hal identitas nilai Partai Golongan Karya juga terkena dampak yaitu citra buruk yang diciptakan dihadapan masyarakat. Selain itu dari konflik yang terjadi merusak hubungan dengan kader yaitu orang-orang pendukung partai. Hal yang memberikan penguatan yaitu Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan partai itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

3). Derajat Otonomi;

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis mengenai derajat otonomi. Derajat otonomi Partai Golongan Karya pun terkena dampak dari konflik internal yang ada, yaitu dengan adanya pihak luar yang ikut campur dalam konflik internal ini.

#### 4). Pengetahuan Publik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis mengenai pengetahuan publik. Apabila mengenai pengetahuan publik sudah jelas bahwa konflik internal Partai Golongan Karya telah diketahui banyak orang, hal ini juga didukung dengan pemberitaan yang ada baik melalui media cetak ataupun media elektronik.

Berdasarkan dari empat kriteria yang dikemukakan oleh Randall dan Svansand, dari empat kriteria yang ada, semuanya terkena dampak dari konflik internal partai. Oleh sebab itu, Partai Golongan Karya untuk kedepannya dalam hal menunjukkan eksistensinya akan terganggu. Meskipun partai ini partai besar dan sudah banyak prestasi yang diraih akan tetapi eksistensinya tetap terganggu.

Jadi, konflik internal yang terjadi di Partai Golongan Karya memiliki dampak terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Provinsi Lampung. Selain itu juga memberikan implikasi yang buruk dalam menjaga eksistensi Partai Golongan Karya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai implikasi konflik internal Partai Golongan Karya terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Provinsi Lampung terjadi karena adanya perbedaan yang mendasar yaitu perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, ataupun perbedaan yang lainnya serta adanya pemanfaatan momentum. Selain itu yang tak kalah penting adalah dari sikap dan gaya kepemimpinan dari partai golongan karya baik yang memimpin di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) baik yang berada tingkat Provinsi ataupun yang berada tingkat Kabupaten atau Kota. Dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran yang dianggap penting untuk penulis sampaikan.

1. Perlunya demokrasi yang lebih ditingkatkan dan ditegaskan kembali di dalam internal partai yang bertujuan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi yang mengatas namakan kepentingan bersama.
2. Pemimpin yang harus bertindak dan berperilaku sebagai pemimpin, bukan memanfaatkan kursi jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja, karena dalam hal ini pemimpin yang akan dijadikan patokan dan pemimpin juga yang akan membawa kemajuan untuk partai.
3. Aturan yang ada di dalam Partai harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam segala hal yang menyangkut kepartaian, karena dalam hal ini aturanlah yang dijadikan pedoman untuk berindak dalam kehidupan partai sehari-hari.
4. Dalam hal terjadinya konflik internal, apabila internal dapat menyelesaikannya jangan melibatkan pihak luar bagaimanapun pihak luar tentunya memiliki tujuan yang berbeda juga dalam hal melakukan dukungan ataupun bantuannya.